

Azwar Anas Sebut 2,3 Juta Pegawai Honorer Kemungkinan Jadi PPPK

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), Abdullah , menyebutkan kemungkinan 2,3 juta akan dijadikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dia baru saja menemui Presiden Jokowi dan diminta untuk menyelesaikan kajian terkait 2,3 juta honorer yang masih menunggu kepastian nasibnya. Dari total 2,3 juta honorer yang mendaftar di aplikasi BKN, kata dia, baru ada 1,8 juta bupati/wali kota yang menandatangani surat pertanggungjawaban mutlak, sebagai pengganti kementerian/lembaga terkait. Azwar menambahkan, kajian pemerintah tersebut akan melibatkan asosiasi dan bupati/wali kota untuk meminta saran terkait jalan tengah. Pasalnya, kepastian nasib honorer sangat kompleks karena jumlahnya yang besar hingga jutaan. Dia mencontohkan, terutama honorer di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), di mana terkonfirmasi membutuhkan 700.000 formasi , namun daerah baru mengusulkan sekitar 400.000 guru honorer. "Kita sedang cari jalan tengah. Kami intens dengan Kementerian Dalam Negeri, dengan BKN, dengan Diknas, dan Kemenkes," imbuhnya. Azwar mengungkapkan, di tahun ini pihaknya sedang mengusulkan formasi kurang lebih 1 juta PPPK yang ini sedang dalam proses untuk klarifikasi bersama Menteri Keuangan. Dari total formasi tersebut, prioritasnya adalah sektor pendidikan dan kesehatan, karena banyak di daerah-daerah terpencil dan pedalaman yang tidak mendapatkan guru ASN. "Banyak juga guru dan tenaga kesehatan yang sudah mengabdikan cukup lama, mereka belum mendapatkan status kepastian, sehingga ini menjadi prioritas, meskipun fresh graduate ini juga kami banyak mendapat masukan untuk kita rekrut bidang tertentu," jelas Azwar. Azwar memastikan pula proses pengangkatan honorer menjadi PPPK ini tidak akan bermasalah, seperti berdampak kepada pembengkakan anggaran, muncul isu yang membuat gejolak maupun terganggunya pelayanan publik. "Karena non-ASN memberikan bantuan yang cukup banyak di berbagai daerah. Tetapi ini agak karena jumlahnya sangat besar kita sedang cari jalan tengah," tegas dia.